

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Gerindra dan Golkar Minta Anies Stop PSBB

Palmerah, Warta Kota

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan tidak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Saat ini, DKI tengah berada di fase ketiga PSBB yang akan berakhir hari Kamis (4/6) ini.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rany Maulani mengatakan, perekonomian Jakarta telah memasuki kondisi krisis. Menurutnya, pelanggaran PSBB sangat diperlukan untuk mengembalikan ekonomi yang terpuruk.

"Kami berharap PSBB diakhiri, tapi dibikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lainnya diterapkan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," kata Rany melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6).

Dia mengatakan, perpanjangan PSBB tidak menjamin Jakarta bakal nihil kasus Covid-19. Menurutnya, pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 lebih meluas.

"Saat ini, tetap terjadi paparan (Covid-19), berarti bisa dibilang PSBB bukan solusi yang te-

pat, mengingat waktu PSBB nya sudah cukup panjang, sudah hampir tiga bulan," ujarnya.

Dia menilai, perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres. Selama ini, PSBB membuat sebagian warga tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya. "Seberapa kuat orang bertahan tanpa penghasilan?" kata perempuan anggota Komisi E itu.

Perpanjangan PSBB juga berisiko besar. "Bisa meningkatkan kriminalitas karena adanya tuntutan kebutuhan ekonomi. Entah lapar, entah buat pengobatan dan lain-lain," kata Rany.

PSBB di Jakarta awalnya dimulai 10-23 April 2020. DKI kemudian memperpanjang PSBB selama 28 hari atau sampai 22 Mei. Berikutnya, PSBB diperpanjang lagi sampai 4 Juni 2020.

Ketua Fraksi Partai Golkar

DPRD DKI Basri Baco menyatakan tidak setuju apabila PSBB kembali diperpanjang. Menurutnya, masyarakat sudah jenuh dengan PSBB sementara tanggung jawab pemerintah terhadap warga mulai dipertanyakan.

"Golkar berharap kita mulai belajar new normal karena tuntutan seperti itu," ujarnya, Rabu.

"Namun bila gubernur perpanjang (PSBB), tentu kami dukung juga tapi komitmen soal kebutuhan warga harus dilaksanakan," kata Basri.

Basri juga menyatakan, jika PSBB akan diperpanjang lagi, penerapannya harus merata.

"Kalau mau diperpanjang gubernur harus komitmen terhadap penerapan aturan PSBB. Jangan sampai kesannya pilih-pilih, misalnya mal dibuka tapi warung warung kecil ditindak," kata Basri.

Menurutnya, banyak masya-

rakat yang mengeluh akibat kebijakan PSBB selama dua bulan ini. Soalnya aktivitas masyarakat dibatasi, bahkan hanya 11 sektor usaha yang hanya diperbolehkan berkegiatan.

"Kalau masyarakat mengeluh, artinya gubernur harus menjamin kebutuhan masyarakat di antaranya bantuan sembako lagi. Tapi apa siap anggarannya?" kata Basri.

Baru-baru ini, beredar kabar mengenai tentang perpanjangan PSBB ke fase keempat mulai hari Kamis ini sampai Kamis (18/6) atau selama dua pekan.

Kepala Biro Hukum Setda DKI Yayan Yuhana belum bisa dimintai konfirmasi.

Sementara itu, di situs data.jakarta.go.id/jalahoaks, Pemprov DKI menegaskan bahwa kabar itu adalah hoaks alias tidak benar. Menurutnya, keputusan PSBB akan disampaikan secara resmi melalui konferensi pers oleh Gubernur DKI. (faf)